

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Sumber Lain

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & analisis kebijakan publik*. Alfabeta. <http://eprints.ipdn.ac.id/2476/>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kota Palembang dalam angka 2021*. <https://palembangkota.bps.go.id/publication/2021/02/26/9d0512b1e001072a24e283ed/kota-palembang-dalam-angka-2021.html>
- Christanto, D. (2021, September 4). *Generasi Muda Diajak Pahami Membayar Pajak Sebagai Cara Bela Negara—Keuangan Katadata.co.id* [Finansial]. Katadata. <https://katadata.co.id/dicky/finansial/613309706ce72/generasi-muda-diajak-pahami-membayar-pajak-sebagai-cara-bela-negara>
- Dodi, O. (2021, October 9). *Realisasi PAD Baru 60 Persen, DPRD Wanti-Wanti BPPD Palembang*. RMOLSUMSEL. <https://www.rmolsumsel.id/realisasi-pad-baru-60-persen-dprd-wanti-wanti-bppd-palembang>
- Dunn, W. N. (1999). *Analisis kebijakan publik*. Gajah Mada University Press.
- Ering, S., Hakim, D. B., & Juanda, B. (2016). Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 17(1), 75–87. <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i1.660>
- Fahrati, E., Rahayu, D., Chandriyanti, I., Yunani, A., Nur, A., & Aufa, N. (2017). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 8(1), 17. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v8i1.1517>
- Geoportal Pemerintah Kota Palembang*. (n.d.). Retrieved May 19, 2022, from <http://geoportal.palembang.go.id/>
- Gie, T. L. (1968). *Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia: Vol. III*. Gunung Agung.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hamidi, J. (2011). *Optik hukum, peraturan daerah bermasalah, menggagas peraturan daerah yang responsif dan berkesinambungan* (Cet. 1). Prestasi Pustaka Publisher.

- Juliansyah, E. (2017). Strategi pengembangan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ekonomak*, 3(2), 19–37.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2001). *Pemerintahan daerah di Indonesia hukum administrasi daerah*. Sinar Grafika.
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)*. <http://kbbi.web.id/pusat>
- Kompas. (2021, December 16). *Kasus Pertama Varian Omicron Terdeteksi pada Petugas Kebersihan Wisma Atlet*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/16/11335571/kasus-pertama-varian-omicron-terdeteksi-pada-petugas-kebersihan-wisma-atlet>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2018)*. Penerbit Andi.
- Museum Nasional. (n.d.). *Prasasti Kedukan Bukit*. Retrieved May 19, 2022, from https://pameranbersamavirtual.id/pameran/MUSEUM_NASIONAL/126
- Narsa, I. M. (2008). What is strategy? *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, VI(1), 25–38.
- Nurhidayat, A., Paramita, D. A. P., & Purba, S. T. (2013). Manajemen strategis sektor pemerintah. *University of Managers*.
- Pemerintah Kota Palembang. (2018). *Rencana strategis 2018-2023 Badan Pengelolaan Pajak Daerah*. Pemerintah Kota Palembang.
- Rahim, H. A. R., & Radjab, E. (2017). *Manajemen strategi / H. Abd. Rahman Rahim & Enny Radjab*. Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rangkuti, F. (2017). *Teknik membedah kasus bisnis analisis SWOT*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2001). *Ilmu makro ekonomi*. PT Media Edukasi.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen stratejik*. Bumi Aksara.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Sofi, I. (2021, January 11). *Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah*. Kementerian Keuangan.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/>

Suandy, E. (2006). *Perencanaan pajak*. Salemba Empat.

Sulistiani, D. (2014). Analisis SWOT sebagai strategi perusahaan dalam memenangkan persaingan bisnis. *El-Qudwah*.

Syahriza, F. R. (2021). *Strategi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah pada Masa Pandemi Covid-19* [Diploma, IPDN Jatinangor]. <http://eprints.ipdn.ac.id/6349/>

Tim Rmolsumsel. (2021, September 15). *[Lapsus] Defisit PAD, Berpihak Kemana Arah Kebijakan Keuangan Pemkot Palembang?* Rmolsumsel. <https://www.rmolsumsel.id/lapsus-defisit-pad-berpihak-kemana-arah-kebijakan-keuangan-pemkot-palembang>

Walikota Palembang. (2021). *8 Objek Pajak Over Target*. Bakohumas Kota Palembang. <https://bakohumas.palembang.go.id/blog/detil/8-objek-pajak-over-target>

Widjaya, HAW. (2002). *Otonomi daerah dan daerah otonom* (Cet. 1). Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.

Widyawati, T. I. (2018). Strategi Pemerintah Kota Tangerang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang. *Jurnal Mozaik*, 9(2), 116–123.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Media Pressindo. <https://lib.ui.ac.id>

Zulchoiri, I. (2021). *Aspek hukum pemberian insentif pajak pada badan usaha sebagai stimulus perekonomian nasional pasca berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019 di Kota Medan (studi pada KPP Pratama Medan Petisah)* [Skripsi]. Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Kota Palembang. (2020). *Keputusan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dalam Wilayah Kota Palembang*. Kota Palembang: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kota Palembang. (2020). *Keputusan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Massal Pajak Bumi dan*

Bangunan Perkotaan dalam Wilayah Kota Palembang Tahun 2020. Kota Palembang: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kota Palembang. (2020). *Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang*. Kota Palembang: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kota Palembang. (2021). *Keputusan Walikota Palembang Nomor 289 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 57 /KPTS/BPPD/2020 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dalam Wilayah Kota Palembang*. Kota Palembang: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kota Palembang. (2021). *Keputusan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Pengurangan Massal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dalam Wilayah Kota Palembang Tahun 2021*. Kota Palembang: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kota Palembang. (2021). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah*. Kota Palembang: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kota Palembang. (2021). *Peraturan Walikota Palembang Nomor 24 Tahun 2021 Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah*. Kota Palembang: Sekretariat Daerah.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.